

DAFTAR INFORMASI YANG DI KECUALIKAN
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

A. BIDANG ANGGARAN DAN PERENCANAAN

NO	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar hukum	Batas Waktu	Aktif	Inaktif	Nasib Akhir
1.	Draf Rencana Kerja Pemerintahan (RKP)	1. Draf adalah dokumen yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila di informasikan akan menimbulkan gejala spekulasi di masyarakat. Kecuali memang untuk dilakukan telaah public; 2. Dapat menimbulkan penilaian yang bersifat absolut seolah-olah RKP tersebut bersifat mutlak/benar akan terealisasi 3. Karena masih bersifat tentatif. (berubah)	1. UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi public pasal 17 huruf i dan j; 2. UUD 17/2003 tentang keuangan negara pasal 6 ayat 1; 3. PP 20/2004 tentang rencana kerja pemerintahan pasal 7 ayat 3	Disampaikan dan disahkan oleh DPR-RI	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

2.	Perhitungan RAPBN kementerian agama sebelum disampaikan dan dibahas dengan DPR-RI	1. RAPBN adalah rencana yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk di dokumentasikan di mungkinkan adanya perubahan-perubahan apabila di informasikan akan menimbulkan gejala spekulasi di masyarakat. Kecuali memang untuk telaah public. 2. Karena RAPBN masih bersifat rancangan dan belum dilakukan pembahasan dan persetujuan dari DPR. 3. Dapat menimbulkan penilaian yang berbeda/bersifat absolut seolah-olah RAPBN sebelum disampaikan dan di bhas DPR tersebut bernilai mutlak/benar.	1. UU 17/2003 tentang keuangan negara; UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 6 ayat (3) huruf e	Disetujui dan disahkan oleh DPR-RI	1 tahun	3 tahun	Musnah
3.	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	1. POK adalah dokumen pelaksanaan kinerja, kegiatan dan rincian anggaran internal dalam satu tahun sebuah lembaga. Jenis kegiatan dan kinerja dapat dipublikasikan, namun untuk rinci kegiatan dan anggaran di mungkinkan terjadi revisi yang di sebabkan adanya perubahan	1. UU 17/2003 tentang keuangan negara; UU 14/2008 tentang kebijakan informasi publik pasal 17 huruf l dan j; PP 21/2004 tentang penyusunan RKA-KL	Setelah di laksanakan audit oleh auditor	1 tahun setelah anggaran berakhir	4 tahun	Dinilai kembali

		kebijakan pemerintah. Sebagai apabila POK terjadi ranah publik dikhawatirkan intervensi publik dapat mengganggu kebijakan kinerja lembaga yang telah ditetapkan. Pengecualian setelah diaudit oleh auditor external.					
		2. Karena merupakan arahan dan petunjuk bagi penyelenggara anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan , panduan bersifat internal; 3. Dapat mengakibatkan instabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran antara lain adalah intervensi bersifat negatif terhadap dokumen anggaran yang sudah ada.					
4.	Dokumen Penawaran Pengadaan	Dokumen penawaran pengadaan sampai dengan sebelum ditetapkannya pemenang bersifat rahasia.	1. Pasal 7 huruf b perpres nomor 16 Tahun 2018; 2. Pasal 26 ayat 3 perpres nomor 16 tahun 2018; 3. Pasal 66 ayat 3 perpres nomor 54 tahun 2010;	Sampai ditetapkannya a pemenang lelang	1 tahun setelah menerima barang	4 Tahun	Musnah

5.	Dokumen Usulan Revisi kegiatan dan anggaran;	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit yang berwenang ; 2. Karena masih bersifat usulan ; 3. Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disahkan dan dibahas serta disahkan oleh pihak terkait.	UU 14/2008, pasal 6 ayat 3 huruf e	Sampai ditetapkan oleh menteri keuangan	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Di nilai kembali
----	--	---	------------------------------------	---	---	---------	------------------

6.	Prencanaan kas harian, mingguan dan bulanan	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang. Yang apabila diinformasikan ke publik diawatirkan akan menimbulkan informasi publik yang tidak akurat; 2. Merupakan bagian dari konsumsi internal; 3. Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disampaikan dan dilakukan penagihan ke KPPN setempat.	UU 14/2008 pasal 6 ayat 3 huruf e		1 tahun setelah UU LKPP diundangkan	9 tahun	
7.	Dokumen Peserta Lelang	Menjaga kerahasiaan identitas peserta lelang	UU 14/2008 ps1 6 ayat 3 huruf e	Selamanya	1 tahun setelah terima barang	4 tahun	musnah

8.	Data Rincian Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang. Yang apabila diinformasikan ke publik di khawatirkan akan menimbulkan informasi publik yang tidak akurat; 2. Dapat menimbulkan penilaian berbeda sebelum dilakukan audit oleh BPK atau Ijen; 3. Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan.	UU No 14 tahun 2008, psl. 6; ayat 3 huruf e	Sampai selesai tanggapannya audit	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	9 tahun	musnah
9.	Dokumen Bayaran Berupa SPP, SPM, SP2D;	1. Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan. 3. Dapat mengakibatkan tidak tertibnya pengarsipan dan pendokumentasian dokumen keuangan (mengakibatkan tercecernya dokumen SPP, SPM, dan SP2D /tidak didokumentasi dengan baik	UU14/2008 tentang KIP psl. 6; ayat (3) huruf e.	Setelah penetapan pemenang lelang	1 tahun setelah serah terima barang	5 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Di nilai kembali

10.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1. HPS merupakan kewenangan PPK, sehingga HPS dijadikan perbandingan harga oleh panitia lelang/ULP dengan harga yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa. Sehingga HPS tidak dapat dipublikasikan untuk umum agar bisa dijadikan perbandingan harga. HPS baru dapat dibuka setelah pemasukan dokumen penawaran oleh penyedia. 2. Dapat menimbulkan penilaian tidak objektif atau tidak diperolehnya harga yang tidak bersaing	Perpres 54/2010 pasal 11	Setelah penetapan pemenang lelang	1 tahun setelah serah terima barang	5 Tahun setelah hal hak dan kewajiban habis	Dinilai kembali
11.	Hasil Evaluasi Proses Pengadaan Barang Dan Jasa	PPK memberikan laporan hasil pengadaan kepada PA/KPA melalui berita acara. ULP bertugas membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan menteri/pimpinan lembaga/kepada daerah/pimpinan institusi dan memberikan pertanggung jawaban atau pelaksanaan kegiatan pengadaan berjasa kepada PA/KPA sehingga hasil evaluasi bukan untuk diakses oleh public tetapi laporan yang diberikan kepada PA/KPA oleh PPK dan ULP.	Perpres 54/2010 pasal 11 dan 17 Perka ANRI 13/2016 (utk arsip)		5 tahun	-	permanent

12.	Dokumen Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN berupa surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan.	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksanaan penatausahaan sebagaimana dalam pasal 5 dan 6 PMK 120-2007. Dengan begitu dokumen tersebut tidak perlu dilaporkan kepada publik karena tidak berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Dalam pasal 6 diatur yang berkaitan dengan rahasia jabatan sehingga tidak dapat diumumkan kepada publik.	1. PMK 120/pmk.06/2007 tentang penatausahaan BMN; 2. Inpres 14/2008	1 Tahun setelah pemeriksaan	3 tahun	Dinilai kembali
13.	Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN	bahwa penilaian barang milik negara diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar yang merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah; sehingga ini tidak dapat diinformasikan kepada public agar pemerintah mendapat kan acuan untuk menyusun neraca pemerintah sebagai pembanding harga yang diajukan ketika melakukan pengadaan barang selain itu dalam pasal 15 PMK 06/2008 penilaian tidak boleh menginformasikan kepada pihak kecuali atas izin pemberi tugas	PP 38/2008 pengganti PP 6/2006 permenku 02/PMK.06/2008 tentang penilaian barang milik negara menteri keuangan.	3 tahun	3 tahun	musnah

14.	BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan untuk keperluan audit BPK/Itjen	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksanaan penatausahaan sebagaimana dalam pasal 5 dan 6 PMK 120-2007. Informasi yang berkaitan dengan informasi public yang diminta belum dikuasai juga tidak dapat diberikan kepada public	1. PMK 120/PMK .06/2007 tentang penatausahaan BMN; 2. UU 14/2008 tentang KIP.	Sampai dengan ada bukti kepemilikan tanah.	Samapai di hapus	2 tahun	musnah
15.	Rekening Koran Bendaharawan;	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang	UU 14/2008 tentang KIP, psl. 6;ayat (3) huruf e		1 tahun setelah UU LKP diundangkan	9 tahun	Dinilai kembali
16.	Hasil Pemeriksaan Reguler, kasus, khusus, review laporan keuangan, evaluasi/pemantauan.	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, yang apabila diinformasikan ke public di khawatirkan akan menimbulkan informasi public yang dapat menghambat proses penegakan hukum;	UU 14/2008 tentang KPI, psl. 17, huruf e		1 tahun setelah UU LKP diundangkan	5 tahun	musnah

17.	Buku Kas Umum (BKU)	1. termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. karena BKU merupakan bukti pertanggungjawaban wajib bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan dan kundumdi pemeriksa.	UU 14/2008 tentang KIP psl. 6; ayat(3) huruf e	1 tahun setelah UU LKP diundangkan	9 tahun	Dinilai kembali
18.	Buku Kas Pembantu (BKP)	1. termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; 2. Karena BKP merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan untuk kepentingan pemeriksaan.	UU 14/2008 tentang KIP psl. 6; ayat(3) huruf e	1 tahun setelah UU LKP diundangkan	9 tahun	Dinilai kembali
19.	Dokumen-Dokumen Pajak	Termasuk didalam dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;	UU 14/2008 tentang KIP psl. 6; ayat(3) huruf e	1 tahun setelah UU LKP diundangkan	9 tahun	Dinilai kembali

20.	Rekonsiliasi Keuangan DIPA		PerDirjen Perbendaharaan nomor 66/2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Dinilai kembali

B. BIDANG KEPEGAWAIAN

NO	Komponen data informasi	Alasan	Dasar hukum	Batas Waktu	Aktif	Inaktif	Nasib akhir
1.	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerja (DP3) penilaian Pekerja Pegawai e-kinerja	1. penilaian kinerja ASN adalah penilaian secara periodic pelaksanaan pekerjaan seorang ASN. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan seorang ASN, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki ASN yang bersangkutan	SE BKN No.11/2023	Selamanya	1 tahun setelah SK ditetapkan	3 tahun	Musnah

		melaksanakan tugas dan ini bersifat rahasia.					
		2. Informasi yang mengungkapkan data otentik bersifat pribadi.					
2.	Rekam Medis ASN	Tidak boleh disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang karena menyangkut individu langungsi pasien. Pemberitahuan kepada pasien. Keluarga pasien harus oleh dokter.	1. PP 10/1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran; 2. PP 32/1996 tentang tenaga kesehatan; 3. Kepmenkes No, 034/birhub/1972 tentang perencanaan dan pemeliharaan rumah sakit; 4. Permenkes No. 749a/menkes/per/xii/89 tentang rekam medis. 5. KMA 120/2012	selamanya	Selama berobat	1 tahun	musnah
3.	Proses mutasi Jabatan Struktural Maupun Fungsional	Hari ini terkait dengan kredibilitas pegawai, serta hal-hal yang terkait dengan alasan adanya mutasi	KMA 492/2003 tentang pemberian kuasa dan mendelegasian wewenang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai.	Pejabat yang bersangkutan di kukuhkan	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali nota dan SK

4.	Informasi kepegawaian meliputi data pribadi, biodata elektronik, berkas arsip pegawai	Karena informasi ini menyangkut rahasia pribadi seseorang dan apabila dipublikasikan dikhawatirkannya akan disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik		1 tahun setelah berhenti/pen siun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali pejabat eselon 1/lainnya ditentukan oleh instansi/pns.
5.	Usul Pembuatan Karis/Karsu	Karena terkait status keabsahan pernikahan pegawai	PP 45/1990 tentang perubahan atas PP 10/1993 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil;	Selamanya	1 tahun setelah identitas ditetapkan	2 tahun	Musnah
6.	Keputusan hukdis, keberatan atau hukdis dan peninjauan kembali atas hukdis pegawai	Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan aib seseorang dimana ini bersifat pribadi dan akan berefek kepada psikologisnya	1. PP 53/2010 Tentang disiplin PNS 2. Perka BKN 21/2010 tentang disiplin pegawai negeri	selamanya	1 tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah, BAP & SK masuk personal file
7.	Keputusan Tentang Pemberian/Penolakan izin cerai, beristri lebih dari satu keterangan untuk melaksanakan perceraian	1. Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih, seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh pejabat dalam mengambil keputusan, apakah	PP 45/1990 tentang perubahan atas PP 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil	Selamanya	-	-	Personal file

		permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. 2. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atas yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.					
8.	Keputusan Pemberhentian Sementara Karena Dilakukan Penahanan Oleh Pihak Yang Berwajib	Untuk kepentingan peradilan seseorang pegawai negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara, karena pegawai yang bersangkutan melakukan kesalahan sehingga berhubungan dengan pihak yang berwajib.	PP 4/1966 tentang pemberhentian sementara pegawai negeri	selamanya	1 tahun setelah berhenti/pen siun	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah, kecuali pejabat eselon/lainnya yang ditentukan oleh instansi/pns yang berjasa secara nasional
9.	Daftar Nama Pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin	Bersifat rahasia yang tidak bisa di publikasikan	KMA 120/2013	Sampai terbitnya keputusan yang inkrah	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
10,	Draft SK pengangkat jabatan struktural	Kalau Masih tahap dalam proses, ini bersifat rahasia, namun ketika sudah ditetapkan dan disahkan boleh dipublikasikan boleh dipublikasikan	KMA 120/2013	Sampai SK ditandatangani pejabat	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

		dikhawatirkan bila audit tersebut sebelum ada kekuatan hukum tetap sudah menuduh seseorang sebagai pesakitan seperti penjelasan di pasal 17 penjelasan dari pasal 6 inpres 14 tahun 2008	2. Pp 61/2010 tentang pelaksanaan keterbukaan informasi				
4.	Program Kerja Pengawasan Tahun (PKPT) yang meliputi rencana obyek pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, besarnya dana pemeriksaan, rencana mulai pemeriksaan, dan rencana penerbitan hasil pengawasan(LHP)	Dapat menghambat proses audit	KM 120/2013	Selesai audit	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
5.	Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal	Karena menurut KMA nomor 207 tahun 2003 merupakan dokumen atau media komunikasi auditor untuk menyampaikan informasi tentang kesimpulan temuan dan rekomendasi hasil audit. Sehingga isi didalamnya dikhawatirkan dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan dapat menghambat penegak hukum seperti pasal 17.	1. KMA 207/2003 pedoman pelaksanaan audit pada itjen departemen agama 2. UU 14/2008 tentang KIP 3. PP 61/2010 tentang pelaksanaan UU 14/2008 4. Kma 120/2013	-	1 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
6.	Laporan Hasil Pemeriksaan badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifat dirahasiakan kecuali atas keputusan	1. UU 14/2008 tentang KIP	Sampai laporan tersebut	3 tahun	3 tahun	permanent

		komisi informasi atau pengadilan pasal 17	2. PP 61/2010 tentang UU 14/2008	bersifat audited			
7.	Laporan Hasil Audit BPKP	Informasi BPKP merupakan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifat dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi informasi atau pengadilan pasal 17	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. PP 61/2010 tentang UU 14/2008	selamanya	3 tahun	3 tahun	permanent
8.	Dokumen-Dokumen Pemeriksaan meliputi: program kerja audit (PKA), kertas kerja audit (KKA), lembaran temuan audit (LTA), dan berita acara pemeriksaan.	Karena terkait dengan pemeriksaan terhadap audit, kalau ini bocor akan menghasilkan pengawasan yang tidak bagus (<i>audit sudah mempersiapkan sebelum pemeriksaan</i>)	PP 61/2010 pelaksanaan UU 14/2008	-	1 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
9.	Dokumen penyelesaian tindak lanjut hasil audit inspektorat jenderal, badan pemeriksa keuangan (BPK), badan pengawasan keuangan dan pembangunan	Ini terkait dengan kerahasiaan dokumen, kalau bocor diawatirkan akan disalah gunakan, bahkan kemungkinan akan diperjual belikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	PP 61/2010 pelaksanaan UU 14/2008	Sampai dokumen hasil audit bersifat audited	1 tahun	3 tahun	Dinilai kembali

D. BIDANG HUKUM

NO	Komponen data informasi	Alasan	Dasar Hukum	Batas Waktu	Aktif	Inaktif	Nasib Akhir
1.	Daftar Inventaris Masalah (DIM)	Tidak dapat dibuka dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum	UU 14/2008 tentang KIP pasal 17	Setelah selesai perkara	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
2.	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (UU, PP, perpres, PMA)	Tidak dapat dibuka karena masih berupa draft	UU 14/2008 tentang KIP pasal 17	Peraturan perundang-undangan (UU, PP, perpres, PMA) saat dilakukan uji publik			
3.	Rancangan Instrumen Hukum lainnya (KMA, kep Pejabat eselon 1, Naskah nota kesepahaman, dan naskah perjanjian kerja sama)	Tidak dapat dibuka karena masih berupa draft	UU 14/2008 tentang KIP pasal 17	Instrumen Hukum Lainnya (KMA, kep Pejabat eselon 1, Naskah nota kesepahaman , dan naskah perjanjian kerja sama) ditetapkan			
4.	Naskah Akademik Pembentukan Undang-Undang	Dapat dibuka karena untuk mendapatkan masukan dari public tentang UU yang akan dibuka	KMA 120/2013	Disampaikan UU diundangkan	1 tahun setelah diundangkan	3 tahun	permanent
5.	Naskah urgensi pembentukan peraturan	Dapat dibuka karena untuk mendapatkan masukan dari public tentang UU yang akan dibuka	UU 14/2008 tentang KIP pasal 17	Sampai peraturan perundang-			

	perundang-undangan (PP, perpres, PMA).			undangan (PP, perpres, PMA) diundangkan			
6.	Dokumen Penanganan Permasalahan Hukum	Tidak dapat dibuka dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum	UU 14/2008 tentang KIP pasal 17	Selamanya	1 tahun setelah diperoleh keputusan berkeputusan hukum tetap & dipenuhi hak dan kewajiban	3 tahun	Dinilai kembali
7.	Dokumen Hukum Dan Surat-Surat yang bersifat rahasia	Tidak dapat dibuka karena dikhawatirkan termasuk surat-surat antar badan public atas intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU 14/2008 tentang KIP pasal 17	selamanya	1 tahun setelah diperoleh keputusan berkeputusan hukum tetap & dipenuhi hak dan kewajiban	3 tahun	Dinilai kembali

E. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NO	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum	Batas Waktu	Aktif	Inaktif	Nasib Akhir
1.	Konfigurasi Data Center	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada.	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	Selamanya	Selama berlaku	5 tahun	permanent

2.	Konfigurasi server	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada.	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	Selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
3.	Konfigurasi Infrastruktur Jaringan Komunikasi Dalam Data Center	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada.;	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
4.	Lokasi Server	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada.;	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	Selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
5.	Internet Protocol/ IP address private	Dikhawatirkan digunakan oleh orang yang tidak berhak yang dapat mengakses data-data yang menurut sifatnya adalah rahasia;	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
6.	Bandwidth Management	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada.;	1. UU 14/2008 tentang KIP	Selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali

			2. UU 11/2008 tentang ITE				
7.	Kode Akses Elektronik	Dikhawatirkan digunakan oleh orang yang tidak berhak yang dapat mengakses data-data yang menurut sifatnya adalah rahasia;	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai sendiri
8.	System Management Database	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada.;	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
9.	Struktur Database	Dikhawatirkan dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak berhak menggunakannya.	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	Selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
10.	Source code	Hak cipta	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	selamanya	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali

11.	Desain Laporan Dalam Aplikasi	Hak Cipta	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 11/2008 tentang ITE	Setelah tidak digunakan	-	-	-	-
12.	Database Aplikasi SISKA (sistem informasi keuangan)	1. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual, dan khawatir nya; 2. Aplikasinya boleh dipublikasikan kecuali data base yang tidak bisa dipublikasikan .	UU 14/2008 tentang KIP pasal 17 huruf b.	Setelah tidak digunakan	-	-	-	-
13.	Database Aplikasi SAI (sistem akuntansi instan)	1. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. 2. Aplikasinya boleh dipublikasikan kecuali data base yang tidak bisa dipublikasikan .	UU 14/2008 tentang KIP pasal 17 huruf b.	Setelah tidak digunakan	-	-	-	-
14.	Database Aplikasi SPM	1. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. 2. Aplikasinya boleh dipublikasikan kecuali data base yang tidak bisa dipublikasikan .	UU 14/2008 tentang KIP pasal 17 huruf b.	Setelah tidak digunakan	-	-	-	-
15.	Database Aplikasi Pendataan Lembaga Pendidikan Islam	1. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. 2. Aplikasinya boleh dipublikasikan kecuali data base yang tidak bisa dipublikasikan .	UU 14/2008 tentang KIP pasal 17 huruf b	Setelah tidak digunakan	-	-	-	-
16	Dokumentasi Aplikasi Dan Sistem	1. Menyangkut hak cipta dan hak intelektual.	UU 14/2008 tentang KIP pasal 17 huruf b	Selamanya	-	-	-	-

		2. Aplikasinya boleh dipublikasikan kecuali data base yang tidak bisa dipublikasikan .					
		2. Aplikasinya boleh dipublikasikan kecuali data base yang tidak bisa dipublikasikan .					

F. BIDANG PENDIDIKAN

NO	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum	Batas Waktu	Aktif	Inaktif	Dinilai Kembali
1.	Soal ujian sekolah , ujian harian, Quis, Ujianian akhir sekolah (UAS), dan ujian nasional (UN) serta kunci jawaban	Menimbulkan kompetisi yang tidak sehat	- UU KIP 14 tahun 2008 pasal 17 poin h	Sampai selesai di ujian	1 tahun	3 tahun	musnah
2.	Nilai Raport Siswa , UN		- UU KIP 14 tahun 2008 pasal 17 poin h	selamanya	10 tahun	Selama diperlukan	musnah
3.	Rekan Bimbingan Dan Penyuluhan Siswa	Jika dibuka dapat berpengaruh pada mentalitas anak	- UU KIP 14 tahun 2008 pasal 17 poin h	selamanya			
4.	Proses evaluasi hasil pembelajaran (penilaian kenaikan kelas)	Dikhawatirkan dapat mengganggu mental anak didik	- UU KIP 14 tahun 2008 pasal 17 poin h	Selamanya	10 tahun	Selama diperlukan	Musnah
5.				selamanya	1 tahun	2 tahun	Musnah

	Proses penetapan PPDB peserta didik baru	Dikhawatirkan dapat mengganggu mental anak didik	- UU KIP 14 tahun 2008 pasal 17 poin h				
6.	Proses evaluasi guru dan kegiatan belajar mengajar	Dikhawatirkan dapat mengganggu mental guru	- UU KIP 14 tahun 2008 pasal 17 poin h	selamanya	1 tahun	1 tahun	musnah
7.	Supervisi penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah/madrasah	Dikhawatirkan dapat mengganggu mental guru	- UU KIP 14 tahun 2008 pasal 17 poin h	selamanya	1 tahun	1 tahun	musnah

G. LAIN LAIN

NO	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum	Batas Waktu	Aktif	Inaktif	Nasib Akhir
1.	Cetak baru (<i>Blue print</i>) gedung kementerian agama dan seluruh satu kerja dibawahnya.	Hak Cipta	UU No. 28 tahun 2014	selamanya	-	-	-
2.	Dokumen Penawaran Kontak	Dapat dibuka sesuai dengan schedule proses pengadaan barang dan jasa	Perpres 54/2010 perka ANRI no. 13/2016	Sampai pada pengumuman pemenang	5 tahun		musnah
3.	Rencana pembelian tanah dari property	Apabila diinformasikan akan menimbulkan gejala spekulasi dan masyarakat	UU 14/2008 pasal 17 huruf e angka 4 perka ANRI 13/2016 tentang rencana pengadaan	5 tahun			musnah
4.	Risalah rapat, slide presentasi, dokumen, rekam suara, dan transkrip rekaman suara dari	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi seta berdasarkan atas putusan komisi informasi atau pengadilan.	UU 14/2008 tentang KIP	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	5 tahun		Permanent

	pelaksanaan rapat-rapat yang bersifat rahasia						
5.	Bahan rapat, risalah rapat pimpinan (Yang bersifat rahasia) kemenag	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi seta berdasarkan atas putusan komisi informasi atau pengadilan;	UU 14/2008 tentang KIP		1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	5 tahun	permanent
6.	Matriks tindak lanjut rapat koordinasi pimpinan (rakorpim)	Dokumen yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila diinformasikan akan menimbulkan gejala spekulasi di masyarakat. Kecuali memang untuk dilakukan telaahan public;	UU 14/2008 tentang KIP	Sampai berkekuatan hukum			
7.	Hasil penelitian/penerbitan yang belum final dan belum memperoleh koreksi serta persetujuan pimpinan untuk dipublikasikan.	Dokumen yang belum final termasuk dokumen yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila diinformasikan akan mengganggu kepentingan perlindungan HAKI	1. UU 14/2008 tentang KIP 2. UU 19/2002 tentang hak cipta	Sampai disetujui pimpinan			
8.	Hasil penelitian daerah konflik	berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Pasal 17 UU KIP	Selamanya	2 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali master permanent
9.	Hasil pemetaan daerah rawan konflik	Berpotensi memunculkan masalah sara	Pasal 17 UU KIP	selamanya	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
10.	Hasil penelitian penyimpangan agama	Berpotensi menimbulkan gejala di masyarakat	Pasal 17 UU KIP	selamanya	2 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali

							master permanent
11.	Hasil audit temuan produk	Terkait penelitian yang harus dipelajari lebih dalam	Pasal 17 UU KIP	Selamanya	2 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali master permanent
12.	Hasil audit lembaga pemeriksa halal(LPH)	Terkait pihak lain, dan tidak boleh dipublish dikarenakan kerahasiaan untuk pihak 3	Pasal 17 UU KIP	selamanya	2 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali master permanent
13.	Informasi Produk	Terkait dengan pihak lain dan menyangkut persaingan bisnis	Pasal 17 huruf b UU KIP	Selamanya	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

H. BARANG DAN JASA

NO	Komponen Data/Informasi	Alasan	Dasar Hukum	Batas Waktu	Aktif	Inaktif	Nasib Akhir
1	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintahan yang menurut sifatnya dirahasiakan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	1. Pasal 17 poin a-j UU KIP 2. Peraturan informasi komisi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi public pasal 51 3. Perka ANRI 13/2016	30 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah

2.	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintahan tahap pemilihan, terdiri dari :					1 tahun	4 tahun	Musnah
	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)		1. UU KIP pasal 17 point b			1 tahun	4 tahun	musnah
	2. Rincian harga perkiraan sendiri(HPS)		2. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah			1 tahun	4 tahun	musnah
	3. Spesifikasi Teknis;		sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah			1 tahun	4 tahun	musnah
	4. Rancangan kontrak;					1 tahun	4 tahun	musnah
	5. Dokumen persyaratan penyedia atau lembar data kualifikasi;					1 tahun	4 tahun	musnah
	6. Dokumen persyaratan penyedia atau lembar data pemilihan;					1 tahun	4 tahun	musnah
	7. Daftar dan kuantitas harga;		3. Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan			1 tahun	4 tahun	musnah
	8. Gambar rancangan pekerjaan;					1 tahun	4 tahun	musnah

	9. Dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan;		persaingan usaha tidak sehat 4. Perka ANRI 13/2016			
	10. Dokumen penawaran penyediaan (pemenang)	1. Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapapun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		1 tahun	4 tahun	musnah
	a) Surat penawaran penyediaan			1 tahun	4 tahun	musnah
	b) Penawaran teknis		a. Penawaran teknis b. Penawaran harga : selama proses pemilihan berlangsung c. Rincian harga penawaran n:10 tahun d. Isian kualifikasi :Selama	1 tahun	2 tahun	musnah
	c) Penawaran harga			1 tahun	2 tahun	musnah
	d) Rincian harga penawaran			1 tahun	2 tahun	musnah

			proses pemilihan berlangsung				
				1 tahun	2 tahun	musnah	
e) Isian kualifikasi (formasi isian kualifikasi/kualifikasi		1. UU KIP pasal 17 point b 2. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, beserta penjelasannya 3. Perka ANRI 13/2016					
11. sertifikat atau lisensi yang masih berlaku dari direktur jenderal kekayaan intelektual		1. UU KIP pasal 17 point b 2. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa	Selama proses pemilihan berlangsung	1 tahun	2 tahun	Musnah	

	kementrian hukum dan hak asasi manusia		pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah			
	12. Berita acara pemberian penjelasan;	Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapapun kecuali penyediaan yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran	1. UU KIP pasal 17 poin b dan pasal 17 poin h 2. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan	1 tahun	4 tahun	musnah
	13. Berita acara pengumuman negosiasi;			1 tahun	4 tahun	musnah
	14. Jawaban sanggah;			1 tahun	4 tahun	musnah

15. Jawaban sanggah banding;		atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	1 tahun	4 tahun	musnah
16. Berita acara penetapan atau pengumuman penyedia;		3. Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	1 tahun	4 tahun	musnah
17. Laporan hasil pemilihan penyedia;	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. UU KIP pasal 17 point b 2. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	1 tahun	4 tahun	Musnah
18. Kertas kerja evaluasi (Administrasi, teknis, harga dan kualitas)			1 tahun	4 tahun	Musnah

			3. Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat					
3.	Tahap pelaksanaan terdiri dari:		4. Perka ANRI 13/2017		1 tahun	4 tahun	musnah	
	1. Dokumen kontrak yang telah ditandatangani setelah perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan;	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	UU KIP pasal 17 point b dan h Perka ANRI 13/2016	30 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah	
	2. Surat tagihan;	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 2. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	1. Undang-undang No tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 2. UU KIP pasal 17 point b, poin h angka 3 dan poin j 3. Perka ANRI 13/2013	30 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah	
	3. Surat perintah membayar;	3. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.			1 tahun	4 tahun	musnah	

	4. Surat permintaan pencairan dana;				1 tahun	4 tahun	musnah	
	5. Laporan pelaksanaan pekerjaan (yang memuat hasil analisis jasa konsultasi);	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat			70 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
	6. Laporan penyelesaian pekerjaan (yang membuat hasil analisis jasa konsultasi);							
	7. Berita acara pemeriksaan hasil pekerja;					1 tahun	4 tahun	musnah
	8. Berita acara serah terima sementara atau provisional hand over	1. UU KIP pasal 17 point b 2. peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai telah diubah dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas	Dikecualikan sampai serah terima akhir pekerjaan		1 tahun	4 tahun	musnah	
	9. Berita acara serah terima atau final hand over					1 tahun	2 tahun	musnah

			peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 3. perkara ANRI 13/2016				
--	--	--	---	--	--	--	--

Palembang, 01 Juli 2025

Kepala,


Syafitri Irwan